

Keamanan Energi dan Pangan

Oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D*)

14/04/2008 23:51:00 WIB



Sumber:

http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53698

JAKARTA, Investor Daily

Dua hal menarik dan layak disimak dari sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 31 Maret lalu. *Pertama*, keamanan energi dan pangan (*energy and food security*) yang menjadi persoalan global dewasa ini. Kendati analisis Kadin dianggap agak seram karena pemerintah dinilai seperti salah semua, Presiden menyambut baik dan mengapresiasi delapan (8) rekomendasi Kadin.

Kedua, Presiden SBY menyambut baik keinginan Kadin untuk memperkuat ekonomi nasional. Potensi Indonesia berupa jumlah penduduk yang mencapai 220 juta jiwa, daya beli (*purchasing power*) yang bertumbuh, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas, sudah saatnya sudah saatnya dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi dan membesarkan pasar domestik secara *all out*.

Harus diakui, konstelasi ekonomi global cenderung berpotensi mengguncang ekonomi Indonesia pada 2008. Tingginya harga minyak dunia hingga menembus US\$100/barel diikuti kenaikan harga komoditas pangan, membayangkan-bayangi kinerja perekonomian Indonesia di tahun tikus ini.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menjadi 2%. Resesi di negeri Paman Sam diperkirakan akan memengaruhi Indonesia dari sisi ekspor, impor, pasar saham, dan pasar uang.

Hal yang juga perlu diwaspadai adalah negara-negara produsen pangan cenderung menahan stok untuk kebutuhan domestiknya dan tidak secara gegabah melempar ke pasar global. AS, contohnya, menahan stok jagung karena tingginya permintaan untuk etanol dalam rangka program biofuel. Hal yang sama terjadi pada kedelai sehingga terjadi krisis kedelai di Indonesia karena kita banyak mengimpor komoditas itu dari AS.

Patut dicatat bahwa kenaikan harga minyak berkorelasi positif dengan kenaikan harga komoditas pangan. Harga batubara meningkat 50% per tahun karena Tiongkok fokus pada kebutuhan domestik dan menahan ekspornya. Harga timah naik 7% karena Indonesia mengurangi ekspornya terkait persoalan struktural pertambangan tanpa izin. Harga gas di Eropa naik sebesar 7,3%, sedangkan harga gas di AS naik sebesar 11,5%.

Di sektor pertanian pun kondisinya hampir sama, harga komoditas pertanian naik 2,5% per November 2007 karena harga minyak nabati dan berlemak lainnya naik 8%. Harga minyak kedelai dunia naik sebesar 12% karena suplai menurun. Harga minyak kelapa

dan minyak biji sawit naik 8,5% karena volumenya. Kenaikan juga terjadi pada karet alam dan kopi masing-masing sebesar 8% dan 5%.

Prioritas Kebijakan

Saya teringat kembali peringatan Stephen Leeb, penulis buku *The Coming Economic Collapse: How You Can Thrive When Oil Costs \$200 a Barrel*. Pada 2006, ia sudah meramalkan bakal terjadi eskalasi harga migas, tertinggi dalam sejarah manusia. Ekonomi AS diramalkan terancam krisis terbesar sejak depresi dunia 1930-an.

Leeb menyarankan kita untuk belajar dari berbagai krisis. Depresi besar 1930-an dan Perang Dunia II mengajarkan kita tentang kesalahan pemerintah dalam memilih kebijakan. Cara yang tepat untuk menghadapi penurunan kinerja ekonomi adalah meningkatkan pengeluaran APBN (bukan dengan APBN berimbang) dan menciptakan likuiditas untuk menutup investasi swasta yang menurun. Tantangan terbesar pemerintah adalah salah dalam menetapkan prioritas kebijakan.

Ancaman era harga energi dan pangan yang tinggi jelas perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah dan BI. Imbas kenaikan harga minyak dunia cepat atau lambat pasti akan memengaruhi perekonomian, khususnya dunia usaha dan konsumen Indonesia. Sejak Januari sampai Oktober 2007, harga minyak tidak pernah turun, bahkan telah naik tiga kali lipat dibanding harga tahun 2000 sekitar US\$27/barel.

Sayangnya, kebijakan energi nasional sampai saat ini belum terarah. Berkurangnya cadangan minyak bumi, tersedianya sumber energi yang dapat dimanfaatkan, serta munculnya kesadaran akan lingkungan, menuntut adanya kebijakan yang berlandaskan paradigma baru: kebijakan yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 terbukti membuat banyak pemain bisnis Indonesia kelabakan dan konsumen merosot daya belinya. Energi masih merupakan komponen biaya yang menentukan hajat hidup banyak perusahaan dan industri di Indonesia.

Koordinasi Kebijakan

Dalam konteks inilah rekomendasi Kadin, khususnya tentang *energy and food security*, amat relevan untuk diperhatikan. *Pertama*, mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan perdesaan secara sungguh-sungguh agar kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dapat diwujudkan. Perlu dievaluasi terkait hambatan program ini setelah 3,5 tahun berjalan.

Kedua, mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki. Road Map Industri 2010 dan Visi 2030 usulan Kadin perlu disinkronkan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, Grand Design Kebijakan Energi, dan Program Revitalisasi Pertanian yang telah dirumuskan pemerintah.

Ketiga, target *lifting* minyak mentah perlu diamankan agar tekanan defisit APBN bisa diminimalisasi, seraya mendorong diversifikasi energi, terutama meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan.

Faktanya, Pertamina bukan lagi pemain utama dalam industri migas Indonesia. Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan asing dengan produksi minyak paling dominan, 44% dari total produksi minyak Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, Chevron Pacific Indonesia terus memantapkan posisi sebagai *leader* dalam produksi minyak. PT

Pertamina sebagai BUMN menempati urutan kedua dengan produksi 136,12 ribu bph dengan pangsa produksi hanya 12%.

Sekarang ini dibutuhkan tidak hanya *policy mix* makro, namun koordinasi kebijakan pada lingkungan metaekonomi. Lingkungan meta ini mencakup antisipasi terhadap *natural disruption*, sektoral, dan daerah. Kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional perlu diintegrasikan dan dipertajam agar tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya *food and energy security*.

Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan dan implementasi pembangunan Indonesia bersifat sektoral serta melibatkan 485 kabupaten/kota serta 33 provinsi.

Semoga dalam sisa waktu yang tinggal 1,5 tahun ke depan, Presiden/Wapres, Menko, para menteri terkait, dan juga Gubernur BI yang baru menyadari ancaman krisis global dan urgensi melakukan perubahan mendasar agar ekonomi kita tidak mudah terombang-ambing dalam gelombang globalisasi.

***) Penulis adalah Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, <http://www.mudrajad.com>.**